

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGELOLAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 1 TAHUN 2018

(Studi Kasus Program Keluarga Harapan pada Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi)

Petrus Christoffer Anggelo Silalahi
NIM 202114083
Universitas Sanata Dharma
2024

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Penerapan akuntabilitas dan transparansi memiliki acuan dari Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Pengumpulan data dari penelitian ini merupakan hasil dari observasi langsung ke Kecamatan Bekasi Timur dan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki kepentingan di PKH yaitu Penyuluh Ahli Muda Sosial, Koordinator PKH, Pendamping PKH, dan Peserta PKH Kecamatan Bekasi Timur dengan komponen Pendidikan, Kesejahteraan sosial, dan Kesehatan. Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan antara perbandingan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 dengan kajian dari buku Mahmudi dan Mardiasmo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada prinsip akuntabilitas hukum dan kejujuran, kebijakan, program, finansial dan penerapan transparansi karakteristik pengungkapan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Hal itu dilihat mekanisme pelaksanaan PKH sudah dijalankan oleh PKH Kecamatan Bekasi Timur yang terdiri dari perencanaan, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, pendampingan PKH, verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat, dan transformasi kepesertaan. Pada akuntabilitas hukum dan kejujuran pada tahap perencanaan serta transparansi karakteristik informatif dan keterbukaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Akuntabilitas, Transparansi.

ABSTRAK

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) ASSISTANCE BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS NO. 1 OF 2018

(Case Study of the Family Hope Program in East Bekasi District, Bekasi City)

Petrus Christoffer Anggelo Silalahi
NIM 202114083
Universitas Sanata Dharma
2024

This study aims to see the application of accountability and transparency in the Family Hope Program (PKH) in East Bekasi District, Bekasi City. The implementation of accountability and transparency has a reference from the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018.

The research method used is qualitative research with a comparative descriptive approach. The data collection from this study is the result of direct observation to East Bekasi District and interviews with parties who have interests in PKH, namely Young Social Expert Extension Officers, PKH Coordinators, PKH Assistants, and PKH Participants of East Bekasi District with the components of Education, Social Welfare, and Health. The research data analysis technique was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions between the comparison of the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 with the study from the Mahmudi and Mardiasmo books.

The results of the study show that the application of accountability to the principles of legal accountability and honesty, policies, programs, finance and the implementation of transparency of disclosure characteristics have been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2018. It is seen that the PKH implementation mechanism has been carried out by PKH East Bekasi District which consists of planning, validation of data on prospective PKH beneficiaries, determination of PKH beneficiary families, implementation of social assistance distribution, PKH assistance, verification of beneficiary family commitments, and membership transformation. Legal accountability and honesty at the planning stage as well as transparency, informative characteristics and openness are not in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2018.

Keywords : *Family Hope Program, Accountability, Transparency*